



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Pemerintah Diingatkan Jamin Kebebasan Berpendapat
Tanggal	: Selasa, 29 Juni 2021
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 3

# Pemerintah Diingatkan Jamin Kebebasan Berpendapat

Dikecam DPR, Pemanggilan BEM UI Membungkam Sikap Kritis

**JAKARTA** - Pemanggilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia oleh rektorat terkait meme Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan banyak pihak. Terkait hal itu pemerintah diingatkan untuk tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Atas pemanggilan itu Aliansi Aksi Solidaritas mengingatkan matinya iklim demokrasi di Kampus UI. Sedikitnya terdapat 44 perkumpulan yang tergabung dalam aliansi tersebut. "Pada 27 Juni 2021 kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpak BEM UI," kata Aliansi Aksi Solidaritas dalam keterangan tertulis, Minggu (27/6/2). "Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PPD/00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang."

Aliansi Aksi Solidaritas menilai surat pemanggilan oleh rektorat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Hal itu menunjukkan bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan merenggang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik.

Saat ini konten yang diunggah di Instagram BEM UI diserang oleh buzzter melalui kolom komentar. Selain itu, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra juga di-

serang. "Adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa kebebasan sipil semakin dikerdil oleh negara dengan sistematis. Membingkai kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berjuring pada surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI, tampak absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat sepihak yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemendekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur bagi manajemen aparat negara wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan, termasuk melalui tulisan," tegasnya.

Pada meme yang diunggah akun resmi @BEMUI\_Official, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual.

Meme tersebut menyebut paradoks pernyataan dan sikap Jokowi selama masa kepemimpinannya sejauh ini. Presiden ketujuh tersebut dinilai kerap mengobral janji manis, tapi tak



BEM UI menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service karena kerap mengumbar janji yang akhirnya tidak ditepati. Hal ini disampaikan BEM UI lewat postingan di akun Twitter-nya dan viral di media sosial. Ketua BEM UI, Leon Alvinda menjelaskan, postingan itu bertujuan untuk mengingatkan sang presiden terkait segala perkataan yang telah diucapkan.

BEM UI menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service karena kerap mengumbar janji yang akhirnya tidak ditepati. Hal ini disampaikan BEM UI lewat postingan di akun Twitter-nya dan viral di media sosial. Ketua BEM UI, Leon Alvinda menjelaskan, postingan itu bertujuan untuk mengingatkan sang presiden terkait segala perkataan yang telah diucapkan.

selaras dengan realitas. Dari pernyataan rindu didemo, revisi UU ITE, pengukuhan KPK, dan renungan janji lainnya.

Mantan Wakil Ketua DPR, FadiZon mengemukakan Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil BEM UI atas sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu merupakan tindakan membungkam kebebasan berpendapat. Sbg alumnui UI, sycne secara sikap Rektorat @univ.indonesia yg cenderung membangkam kebebasan ber-

ekspresi. Dia menyindir narasi "Taliban" cukup dimainkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja. Seba, lanjutnya, mahasiswa yang kritis adalah asset bangsa yang harus dijaga.

Sementara itu, BEM UI membenarkan bahwa sejumlah pengurus dianggap oleh pihak Rektorat UI terkait pelahman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya sudah tepat.

"Menurut YLBHI, sudah tepat yang disuarakan BEM UI tentang lip service khususnya yang paling nyata terkait KPK," ujarnya.

□ muhammadrefisandi/

krinasembiring/

erfanmaaruf/carlosroyf

BEM UI dipanggil atau mereka diberi sanksi. "UI harusnya mengajak mendalam apa yg disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi argumentasi. Sungguh memalukan pakai 'panggilan' segala," tulis politikus Partai Gerindra Idris.

Leon mengaku masih belum mengetahui secara jelas tindak lanjut pemanggilan tersebut.

Diamengatakan pihak Rektorat UI harakan membahas perihal postingan akun media sosial BEM UI tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berencana akan mendampingi sejumlah mahasiswa BEM UI yang direncanakan akan dipanggil oleh pihak Rektorat UI. "Kami sedang mendata orang-orang yang sudah siap mendampingi kawan-kawan BEM apabila diperlukan," ujar Ketua YLBHI, Asfinawati, ketika dikonfirmasi, Senin (28/6).

Dia menyebutkan perihal pemanggilan mahasiswa itu dapat merenggut kebebasan berpendapat dan dapat memengaruhi psikolog atau mental dari para pengurus BEM UI. "Bisa dikategorikan pembungkaman yang terlalu kelihatan motif kepentingannya, saya menganggap ini memalukan untuk kampus sekelas UI," katanya.

Asfinawati menambahkan pesan kritis tertulis yang disampaikan para anggota BEM UI terkait pelahman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya sudah tepat. "Menurut YLBHI, sudah tepat yang disuarakan BEM UI tentang lip service khususnya yang paling nyata terkait KPK," ujarnya.